



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9813-9820

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 - 2024

Rizka Agustianti, Pakri Fahmi, Fitriani Ariska

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

rizkaagustiantirizka@gmail.com, poakhrifahmi@gmail.com, fitrianiariska20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada periode 2014-2024. Isu ini penting karena otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten memiliki kapasitas fiskal yang kuat, tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik, portal data APBD Kementerian Keuangan, dan laporan realisasi APBD daerah. Variabel dependen adalah rasio kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel independen mencakup PAD, DAK, dan belanja modal. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda dengan bantuan EViews, didahului pengujian asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model dan konsistensi hasil estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan probabilitas 0,0272. DAK tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,6935, sedangkan belanja modal juga tidak signifikan dengan probabilitas 0,8701. Secara simultan, ketiga variabel tidak berpengaruh signifikan pada taraf 5%, dengan Prob(F-statistic) 0,098788. Nilai R² sebesar 0,623483 menunjukkan bahwa 62,34% variasi kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh model. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan PAD, pengelolaan transfer yang produktif, dan belanja modal yang terarah perlu ditempatkan sebagai strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bengkulu Tengah serta memperluas ruang kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dari penyelenggaraan otonomi daerah karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kerangka tersebut, kemandirian keuangan daerah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan administratif dalam menyusun APBD, tetapi juga sebagai kapasitas riil daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan melalui sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Semakin tinggi kemampuan daerah membiayai kegiatannya melalui PAD, semakin besar pula keleluasaan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tanpa ketergantungan yang terlalu besar pada transfer pusat.

Penguatan kemandirian keuangan daerah memperoleh relevansi yang semakin besar setelah kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, perluasan basis pajak daerah, dan pengurangan ketimpangan fiskal antarwilayah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan pajak daerah, retribusi daerah, transfer ke daerah, dan belanja daerah sebagai satu kesatuan kebijakan fiskal yang harus dikelola secara sinergis. Dengan demikian, keberhasilan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana transfer yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan daerah mengubah potensi ekonomi lokal menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Bengkulu masih menghadapi tantangan dalam membangun kemandirian fiskal. Struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa kontribusi PAD relatif

kecil dibandingkan komponen transfer, terutama DAK pada beberapa tahun pengamatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang fiskal daerah masih dipengaruhi oleh kebijakan pusat, baik dalam bentuk alokasi dana transfer maupun penentuan program pembangunan tertentu. Ketergantungan semacam ini dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah ketika harus menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan lokal yang berubah cepat.

PAD menjadi variabel yang sangat penting karena menggambarkan kekuatan ekonomi daerah dan efektivitas pemerintah dalam mengelola sumber penerimaan. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah merupakan instrumen yang secara langsung dapat diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah. Apabila PAD meningkat secara konsisten, daerah memiliki peluang lebih besar untuk membiayai program pembangunan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya bersifat teknis penerimaan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, basis data wajib pajak, kepatuhan masyarakat, dan kualitas layanan publik.

DAK memiliki fungsi yang berbeda dengan PAD karena dana ini berasal dari pemerintah pusat dan diarahkan untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Di satu sisi, DAK dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang sulit dibiayai dari PAD. Di sisi lain, besarnya DAK tidak secara otomatis mencerminkan kemandirian daerah karena penggunaannya telah ditentukan dan ruang diskresi daerah relatif terbatas. Apabila DAK tidak diarahkan pada kegiatan yang mampu memperkuat ekonomi lokal, dana tersebut hanya menjadi sumber pembiayaan proyek tanpa dampak yang memadai terhadap peningkatan PAD pada periode berikutnya.

Belanja modal juga menjadi instrumen penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah. Belanja modal diarahkan untuk memperoleh aset tetap, membangun infrastruktur, memperbaiki fasilitas publik, serta mendukung produktivitas ekonomi masyarakat. Secara teoretis, belanja modal yang efektif dapat memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan nilai tambah wilayah, dan pada akhirnya memperbesar basis pajak serta retribusi daerah. Namun, pengaruh tersebut sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, keberlanjutan pemanfaatan aset, serta hubungan antara proyek yang dibiayai dengan potensi penerimaan daerah.

Fenomena keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode pengamatan menunjukkan adanya fluktuasi PAD, perubahan nilai DAK yang cukup tajam, dan belanja modal yang belum stabil. Rasio kemandirian keuangan daerah juga masih berada pada tingkat yang relatif rendah, sehingga memperlihatkan bahwa kemampuan daerah membiayai kebutuhan fiskalnya melalui pendapatan sendiri belum optimal. Kondisi ini penting ditelaah karena peningkatan PAD, pengelolaan DAK, dan alokasi belanja modal sering diposisikan sebagai strategi utama penguatan fiskal, tetapi pengaruh empiris ketiganya tidak selalu sama pada setiap daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PAD cenderung berhubungan positif dengan kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana transfer dapat memperkuat pembangunan tetapi sekaligus mempertahankan ketergantungan fiskal jika tidak diikuti peningkatan pendapatan sendiri. Temuan mengenai belanja modal juga beragam karena sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif, sedangkan penelitian lain menemukan bahwa belanja modal tidak langsung meningkatkan kemandirian fiskal. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih kontekstual pada daerah tertentu, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal tersendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh PAD, DAK, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2014-2024. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keuangan daerah, khususnya mengenai hubungan antara pendapatan daerah, transfer pusat, dan belanja produktif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi peningkatan PAD, memperbaiki efektivitas belanja modal, dan mengarahkan pemanfaatan DAK agar lebih produktif bagi perekonomian lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena objek penelitian berupa data numerik yang dapat diukur, dibandingkan, dan dianalisis secara statistik. Sifat eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Khusus, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perkembangan data, tetapi juga menguji apakah perubahan pada variabel independen memiliki pengaruh terhadap perubahan rasio kemandirian keuangan daerah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk runtut waktu tahunan. Sumber data berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik, publikasi Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, portal data APBD Kementerian Keuangan, serta dokumen realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemilihan data sekunder dilakukan karena variabel penelitian berkaitan dengan realisasi anggaran dan indikator fiskal yang telah dicatat oleh lembaga resmi. Data kemudian disusun dalam satuan yang sama, yaitu miliar rupiah untuk PAD, DAK, dan belanja modal, sedangkan kemandirian keuangan daerah disajikan dalam bentuk rasio.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berkaitan dengan PAD, DAK, belanja modal, dan kemandirian keuangan daerah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria data tahunan yang memuat seluruh variabel penelitian secara lengkap dan dapat dibandingkan antarperiode. Dengan demikian, sampel yang digunakan adalah data keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode 2014-2024 sesuai ketersediaan data yang memenuhi kebutuhan analisis.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen adalah kemandirian keuangan daerah, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui PAD dibandingkan sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah. Variabel independen terdiri atas PAD, DAK, dan belanja modal. PAD diposisikan sebagai indikator kekuatan pendapatan sendiri, DAK sebagai indikator dana transfer yang bersifat khusus, sedangkan belanja modal sebagai indikator pengeluaran pembangunan yang diharapkan menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang.

Variabel	Definisi Operasional	Satuan/Ukuran
Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri. Variabel ini diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan perbandingan PAD terhadap sumber pendapatan daerah yang berasal dari luar daerah.	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi daerah sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.	Miliar rupiah
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional dan kebutuhan daerah tertentu.	Miliar rupiah
Belanja Modal (BM)	Pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode anggaran, seperti pembangunan infrastruktur, gedung, jalan, irigasi, peralatan, dan aset publik lainnya.	Miliar rupiah

Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda karena penelitian ini menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini dipilih untuk mengetahui arah pengaruh, besarnya koefisien, dan tingkat signifikansi masing-masing variabel. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KKD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAK + \beta_3 BM + e$$

Keterangan: KKD adalah kemandirian keuangan daerah, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah, DAK adalah Dana Alokasi Khusus, BM adalah belanja modal, α adalah konstanta, β_1 , β_2 , dan β_3 adalah koefisien regresi, serta e adalah error term. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, dan koefisien determinasi untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi kemandirian keuangan daerah.

Uji t digunakan untuk menilai apakah PAD, DAK, dan belanja modal secara individual berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sementara itu, koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi perubahan kemandirian keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh PAD, DAK, dan belanja modal.

Penelitian ini memiliki batasan pada jumlah observasi karena menggunakan data tahunan daerah dalam satu kabupaten. Oleh karena itu, interpretasi hasil lebih diarahkan pada pemahaman kecenderungan fiskal Kabupaten Bengkulu Tengah, bukan generalisasi untuk seluruh daerah. Meskipun demikian, analisis runtut waktu tetap relevan karena dapat menggambarkan dinamika keuangan daerah dalam satu periode kebijakan yang cukup panjang.

3. Hasil dan Diskusi

a. Perkembangan Data Penelitian

Data penelitian menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. PAD meningkat pada beberapa tahun, tetapi belum mampu mendominasi struktur pendapatan daerah. DAK memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan PAD pada beberapa periode, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran dana transfer masih sangat kuat dalam struktur keuangan daerah. Belanja modal juga berfluktuasi, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu dianalisis lebih lanjut secara empiris.

Rata-rata PAD selama periode pengamatan sebesar 23,07 miliar rupiah, dengan nilai terendah 15,25 miliar rupiah dan tertinggi 32,12 miliar rupiah. Angka ini memperlihatkan bahwa kemampuan daerah menggali pendapatan sendiri masih terbatas, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan pada akhir periode. Kenaikan PAD pada tahun 2024 menjadi sinyal positif, tetapi nilai tersebut masih perlu dilihat dalam perbandingan dengan dana transfer dan kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat.

DAK memiliki rata-rata yang jauh lebih besar dibandingkan PAD, yaitu sekitar 229,02 miliar rupiah. Nilai DAK yang sangat tinggi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya intervensi pembiayaan pusat yang kuat terhadap pembangunan daerah. Namun, dari perspektif kemandirian fiskal, peningkatan transfer tidak selalu mengindikasikan perbaikan kapasitas daerah karena dana tersebut tidak berasal dari sumber ekonomi daerah sendiri.

Belanja modal rata-rata berada pada kisaran 146,83 miliar rupiah. Fluktuasi belanja modal memperlihatkan bahwa belanja pembangunan belum bergerak secara stabil dari tahun ke tahun. Apabila belanja modal diarahkan pada proyek yang produktif, dampaknya diharapkan muncul melalui peningkatan aktivitas ekonomi, perluasan basis pajak, dan bertambahnya retribusi. Akan tetapi, apabila belanja modal lebih banyak terserap pada aset yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi, pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah menjadi lebih terbatas.

Tabel 2. Data PAD, DAK, Belanja Modal, dan KKD Kabupaten Bengkulu Tengah

Tahun	PAD (Miliar Rp)	DAK (Miliar Rp)	BM (Miliar Rp)	KKD
2014	16,48	52,58	120,18	0,0320
2015	19,06	86,35	197,28	0,0329
2016	27,25	147,60	222,65	0,0413
2017	23,68	113,90	132,02	0,0389
2018	23,45	117,19	133,49	0,0433
2020	23,34	130,46	111,58	0,0389
2021	15,25	115,26	141,07	0,0250
2022	24,14	748,56	151,55	0,0367
2023	25,97	677,35	133,55	0,0445
2024	32,12	100,94	124,95	0,0399

Sumber: Diolah dari data penelitian.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Rata-rata	Median	Minimum	Maksimum	Std. Dev.
PAD	23,07	23,57	15,25	32,12	5,06
DAK	229,02	116,23	52,58	748,56	256,87
BM	146,83	133,52	111,58	222,65	35,52
KKD	0,0373	0,0389	0,0250	0,0445	0,0059

b. Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan signifikansi pengaruh PAD, DAK, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Estimasi dilakukan setelah data dinilai memenuhi prasyarat analisis melalui pengujian asumsi klasik. Ringkasan hasil regresi disajikan pada Tabel 4.

Model regresi menunjukkan bahwa koefisien PAD bernilai positif, koefisien DAK bernilai positif sangat kecil, dan koefisien belanja modal juga bernilai positif tetapi tidak signifikan. Perbedaan tingkat signifikansi antarvariabel menunjukkan bahwa peningkatan nominal anggaran tidak selalu memiliki makna yang sama terhadap kemandirian fiskal. PAD berhubungan langsung dengan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, sedangkan DAK dan belanja modal memerlukan mekanisme transmisi yang lebih panjang sebelum dapat memengaruhi rasio kemandirian.

Interpretasi hasil regresi perlu dilakukan secara hati-hati karena rasio kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh perbandingan antara pendapatan sendiri dan pendapatan eksternal. Variabel yang berasal dari transfer dapat memperbesar total pendapatan daerah, tetapi tidak otomatis menaikkan rasio kemandirian apabila PAD tidak meningkat secara seimbang. Oleh karena itu, signifikansi PAD dalam model ini menjadi temuan yang secara substantif paling kuat.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,017442	0,009040	1,929391	0,1019
PAD	8,06E-06	2,78E-06	2,902884	0,0272
DAK	2,47E-08	5,98E-08	0,413618	0,6935
BM	7,14E-08	4,18E-07	0,170675	0,8701

c. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0272, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien PAD sebesar 8,06E-06 menunjukkan arah pengaruh positif. Dengan demikian, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan Frijunita et al. (2024), Mulyani et al. (2024), serta Musviyanti et al. (2022) yang menempatkan PAD sebagai faktor penting dalam penguatan kemandirian fiskal daerah.

Secara konseptual, PAD merupakan indikator kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Jika pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah dapat ditingkatkan, maka kontribusi pendapatan sendiri terhadap total pendapatan daerah juga akan meningkat. Oleh karena itu, PAD menjadi faktor utama yang perlu diperkuat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh positif PAD juga dapat dipahami dari hubungan langsung antara penerimaan asli daerah dan rasio kemandirian. Ketika PAD meningkat, daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai belanja operasional, pelayanan publik, dan sebagian program pembangunan tanpa menunggu dukungan transfer. Kondisi tersebut akan memperkuat posisi fiskal daerah karena keputusan anggaran dapat lebih disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal.

Namun, peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan melalui kenaikan tarif pajak atau retribusi. Pemerintah daerah perlu memperbaiki basis data wajib pajak, meningkatkan kemudahan layanan pembayaran, mengurangi kebocoran penerimaan, dan mengembangkan sektor ekonomi potensial. Dengan cara tersebut, PAD dapat meningkat tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

d. Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

DAK memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6935, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Meskipun DAK berperan membantu pembiayaan pembangunan, dana ini merupakan transfer dari pemerintah pusat yang penggunaannya telah diarahkan pada kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, peningkatan DAK tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kemampuan daerah membiayai kebutuhannya dari sumber pendapatan sendiri. Temuan ini sejalan dengan kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah yang menempatkan transfer sebagai instrumen pemerataan kapasitas fiskal, bukan sebagai indikator pendapatan asli daerah.

Temuan ini memperkuat gambaran bahwa dominasi transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah belum dapat dianggap sebagai bentuk kemandirian fiskal. DAK dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting, tetapi efektivitasnya perlu diarahkan pada program yang mampu menciptakan dampak ekonomi produktif dan mendorong pertumbuhan PAD pada periode berikutnya.

Tidak signifikannya DAK juga menunjukkan bahwa dana transfer tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan peningkatan rasio kemandirian. DAK dapat membiayai pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, atau fasilitas pelayanan dasar, tetapi manfaat fiskalnya baru muncul apabila proyek tersebut mendorong kegiatan ekonomi dan memperluas objek pajak atau retribusi daerah. Jika hubungan antara proyek DAK dan potensi penerimaan tidak dirancang sejak awal, maka DAK cenderung berfungsi sebagai penopang belanja, bukan sebagai pendorong kemandirian.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, besarnya DAK pada beberapa tahun perlu ditempatkan sebagai peluang untuk memperkuat fondasi pembangunan. Pemerintah daerah dapat menghubungkan penggunaan DAK dengan strategi PAD melalui pemetaan sektor unggulan, penataan kawasan ekonomi lokal, peningkatan aksesibilitas wilayah produktif, dan perbaikan layanan dasar yang mendukung aktivitas masyarakat. Dengan demikian, dana transfer tidak hanya habis sebagai belanja proyek, tetapi menghasilkan efek lanjutan terhadap pendapatan daerah.

e. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,8701, lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara teori, belanja modal seharusnya mampu meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu muncul dalam jangka pendek. Temuan ini mendukung pandangan bahwa belanja modal tidak otomatis memperkuat kemandirian fiskal apabila tidak diarahkan pada program yang produktif dan berkaitan langsung dengan perluasan basis PAD.

Tidak signifikannya belanja modal dapat disebabkan oleh adanya jeda waktu antara realisasi belanja dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, efektivitas belanja modal sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran proyek, dan keterkaitan langsung belanja tersebut dengan peningkatan basis pendapatan daerah. Dengan demikian, belanja modal tetap penting, tetapi harus diarahkan pada sektor yang benar-benar produktif dan mampu memperluas sumber PAD.

Belanja modal yang tidak signifikan juga dapat mengindikasikan bahwa pembangunan aset belum sepenuhnya diikuti oleh strategi pemanfaatan ekonomi. Infrastruktur jalan, gedung, jaringan irigasi, atau peralatan publik akan memberi dampak fiskal apabila terhubung dengan aktivitas produksi, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan yang menghasilkan penerimaan. Tanpa mekanisme pemanfaatan yang jelas, aset daerah dapat meningkatkan beban pemeliharaan, sementara kontribusinya terhadap PAD tetap terbatas.

Hasil ini tidak berarti bahwa belanja modal tidak penting. Belanja modal tetap menjadi instrumen utama pembangunan daerah, tetapi manfaat fiskalnya bersifat tidak langsung. Pemerintah daerah perlu menempatkan

belanja modal sebagai investasi publik yang memiliki indikator kinerja ekonomi, bukan hanya sebagai realisasi anggaran. Perencanaan belanja modal sebaiknya dilengkapi analisis manfaat, proyeksi biaya pemeliharaan, dan potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

f. Pengaruh Simultan dan Implikasi Kebijakan

Hasil uji F menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,098788, lebih besar dari 0,05. Artinya, secara simultan PAD, DAK, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada taraf signifikansi 5%. Walaupun demikian, nilai tersebut mendekati signifikan pada taraf 10%, sehingga hubungan ketiga variabel tetap memiliki relevansi untuk diamati lebih lanjut.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,623483 menunjukkan bahwa 62,34% variasi kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh PAD, DAK, dan belanja modal, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Variabel lain tersebut dapat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, pertumbuhan ekonomi, belanja pegawai, efektivitas pajak daerah, kualitas tata kelola anggaran, atau efisiensi belanja daerah.

Secara substantif, hasil simultan yang tidak signifikan memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal tidak cukup dijelaskan oleh besaran tiga komponen anggaran tersebut. Kemandirian daerah berkaitan dengan struktur ekonomi, kapasitas administrasi perpajakan, kepatuhan masyarakat, kualitas belanja, dan kemampuan pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, analisis kemandirian keuangan daerah perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar kenaikan nominal pendapatan dan belanja.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa strategi fiskal Kabupaten Bengkulu Tengah perlu diarahkan pada penguatan pendapatan sendiri dan peningkatan produktivitas belanja. PAD menjadi faktor yang terbukti berpengaruh, sedangkan DAK dan belanja modal perlu dikelola agar menghasilkan efek ekonomi yang lebih nyata. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah harus menghubungkan perencanaan pendapatan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan dalam satu siklus yang konsisten.

Dari sisi tata kelola, pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi pendapatan yang terintegrasi, memperbarui data objek pajak dan retribusi, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah. Penguatan PAD tidak dapat dibebankan hanya kepada badan pendapatan daerah, tetapi memerlukan dukungan sektor perizinan, perdagangan, pariwisata, pekerjaan umum, dan pelayanan publik. Semakin kuat koordinasi lintas sektor, semakin besar peluang daerah memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi yang berkembang.

Dari sisi belanja, prioritas pembangunan sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan penguatan ekonomi lokal. Infrastruktur pendukung pertanian, perdagangan, konektivitas wilayah, dan pelayanan dasar yang meningkatkan produktivitas masyarakat perlu memperoleh perhatian. DAK dan belanja modal dapat menjadi instrumen pengungkit apabila dirancang untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya memperluas sumber PAD.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD menjadi faktor utama dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena merupakan dana transfer dengan penggunaan yang relatif terbatas dan tidak berasal dari sumber pendapatan daerah sendiri. Belanja modal juga tidak berpengaruh signifikan, kemungkinan karena manfaatnya bersifat jangka panjang dan sangat bergantung pada efektivitas alokasi anggaran. Secara simultan, PAD, DAK, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada taraf 5%, tetapi model mampu menjelaskan 62,34% variasi kemandirian keuangan daerah. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat ditentukan oleh kemampuan memperkuat pendapatan asli daerah. DAK dan belanja modal tetap memiliki arti strategis, tetapi keduanya belum terbukti secara langsung meningkatkan rasio kemandirian fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap dana transfer dan belanja pembangunan memiliki keterkaitan dengan penguatan ekonomi lokal, perluasan basis penerimaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa persoalan kemandirian keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan jumlah anggaran, tetapi juga dengan kualitas pengelolaan fiskal. Kenaikan belanja modal tidak akan memperkuat kemandirian apabila tidak diikuti perencanaan berbasis manfaat dan pemanfaatan aset

secara optimal. Demikian pula, peningkatan DAK perlu diarahkan pada proyek yang memberi dampak ekonomi lanjutan bagi masyarakat dan pemerintah daerah

Referensi

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah. (2024). Kabupaten Bengkulu Tengah dalam angka 2024. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah. (2025). Kabupaten Bengkulu Tengah dalam angka 2025. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Portal data APBD pemerintah daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Fadhila, L., & S. S. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Universitas 45 Surabaya*.
5. Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, tax effort, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(2), 236-247. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>
6. Ichi, I., Agustin, P. L., & A. K. (2024). The influence of the proportion of capital expenditures, total BUMD, intergovernmental revenue and local taxes on local government financial independence as strengthening fiscal decentralization. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
7. Irfan, W. A. (2025). Analyzing the role of regional revenue and employee spending on financial autonomy: Evidence from Banten Province. *Indonesian Journal of Economics and Finance*.
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Informasi APBN dan transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Rencana kerja pemerintah tahun 2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
10. Maharani, P., Wahyuddin, Marzuki, & Jummaini. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 3810-3818.
11. Mulyani, H. S., Prihartini, E., Sudimo, D., & Amal, I. (2024). Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah dan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(2). <https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i2.9579>
12. Musviyanti, Khairin, F. N., Bone, H., Syakura, M. A., & Yudaruddin, R. (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 79-89. [https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.07](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.07)
13. Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244-250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
14. Nurjana, D., & Pasaribu, V. L. D. (2023). Pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah: Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2012-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 109-121.
15. Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
16. OECD. (2024). Going granular with regional and municipal fiscal data: OECD regional development studies. OECD Publishing.
17. OECD. (2024). OECD fiscal decentralisation database. Organisation for Economic Co-operation and Development.
18. Putri, I. N., & Berliani, K. (2025). Pengaruh PAD, belanja daerah, dan SILPA terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang Selatan 2015-2024. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1).
19. Rahayu, T. S., & Jaeni, J. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap belanja modal dengan rasio kemandirian sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(1).
20. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
21. Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
22. Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
23. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
24. Rosan Fariyanda, A. U., & M. M. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dalam era desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Daerah*, 9(1).
25. Syaifullah, A. R. (2025). The influence of central government transfers and local own-source revenue on capital expenditure in regional governments. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting*, 6(1).